



Gede Wijaya Kusuma¹
 Sri Delvianty Hinelo²
 Ratna Indriasari³
 Otti Ilham Khair⁴

IMPLEMENTASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI TINGKAT RUKUN TETANGGA

Abstrak

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu isu penting dalam konteks pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Di tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, seperti tingkat Rukun Tetangga (RT), upaya pemberantasan korupsi memiliki dampak yang signifikan terhadap keadilan sosial dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang bagaimana implementasi pemberantasan korupsi di tingkat RT diwujudkan dalam praktik sehari-hari. Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (literature review). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberantasan korupsi di tingkat RT sangat penting untuk memastikan pengelolaan dana dan aset publik yang lebih transparan dan akuntabel. Diperlukan komitmen kuat dari para pemimpin RT dan warga masyarakat untuk bekerja sama dalam upaya pencegahan korupsi. Pemimpin RT memiliki peran sentral dalam mempromosikan integritas dan mencegah korupsi di lingkungan mereka. Pemimpin RT dapat menjadi teladan dengan menunjukkan perilaku yang jujur, transparan, dan etis. Pemimpin RT berperan penting dalam pengelolaan dana dan aset publik di tingkat RT. Mereka harus memastikan bahwa proses alokasi dan penggunaan dana publik berjalan dengan transparan dan akuntabel. Partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat RT adalah faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Namun, tingkat partisipasi ini sering kali bervariasi, dan ada beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat diantaranya tingkat kesadaran masyarakat tentang korupsi dan dampak negatifnya serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah RT dan lembaga terkait.

Kata Kunci: Implementasi, Pemberantasan Korupsi, Tingkat RT

Abstract

Eradicating corruption is an important issue in the context of development and good governance. At the level of government closest to the community, such as the Rukun Tetangga (RT) level, efforts to eradicate corruption have a significant impact on social justice and efficiency in government administration. This research aims to gain an in-depth understanding of how the implementation of eradicating corruption at the RT level is realized in daily practice. This type of research uses qualitative research with a literature review method. The research results show that the implementation of corruption eradication policies at the neighborhood level is very important to ensure more transparent and accountable management of public funds and assets. A strong commitment is needed from RT leaders and community members to work together in efforts to prevent corruption. Neighborhood leaders have a central role in promoting integrity and preventing corruption in their environment. RT leaders can be role models by demonstrating honest, transparent and ethical behavior. RT leaders play an important role in managing public funds and assets at the RT level. They must ensure that the process of allocating and using public funds is transparent and accountable. Community participation in efforts to eradicate corruption at the RT level is a key factor in creating a cleaner and more transparent environment. However, this level of participation often varies, and there are several factors that influence community participation, including the level of public awareness about corruption and its negative impacts as well as the level of public trust in the RT government and related institutions.

Keywords: Implementation, Eradication of Corruption, RT

^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara
 email: gede.wijaya@stipan.ac.id

PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu isu penting dalam konteks pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut pendapat (Ferico et al., 2020) menyatakan bahwa pemberantasan korupsi seringkali menghadapi hambatan yang sulit diatasi. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada lingkungan birokrasi di lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, tetapi juga merasuk ke dalam sektor swasta, dunia usaha, dan berbagai lembaga dalam masyarakat secara luas. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi bukan hanya tanggung jawab pihak berwenang, melainkan juga tugas seluruh masyarakat dan semua komponen negara.

Di tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, seperti tingkat Rukun Tetangga (RT), upaya pemberantasan korupsi memiliki dampak yang signifikan terhadap keadilan sosial dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik, penelitian kualitatif yang mendalam mengenai implementasi pemberantasan korupsi di tingkat RT menjadi semakin relevan dan penting (Sufaidi et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, RT memiliki peran yang sangat vital dalam pelayanan publik dan pemeliharaan ketertiban di lingkungan sehari-hari. Karena itu, menjaga integritas dan mencegah korupsi di tingkat RT adalah langkah awal yang sangat penting dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih dan efisien.

Meskipun berbagai peraturan dan kebijakan anti-korupsi telah dikeluarkan oleh pemerintah, implementasi di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan yang unik dan beragam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang bagaimana implementasi pemberantasan korupsi di tingkat RT diwujudkan dalam praktik sehari-hari. Penelitian ini akan mencakup aspek-aspek seperti kebijakan yang telah ada, peran pemimpin RT, serta persepsi dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan mereka. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan wawasan yang bermanfaat untuk perbaikan dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat RT, serta memberikan kontribusi bagi literatur dan pemahaman lebih lanjut mengenai tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal.

Melalui penelitian ini, diharapkan bahwa kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implementasi pemberantasan korupsi di tingkat RT, serta memberikan rekomendasi yang dapat mendukung peningkatan efektivitas upaya pemberantasan korupsi di tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan agenda pemberantasan korupsi nasional dan kontribusi terhadap pemahaman kita tentang tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal.

METODE

Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (literature review) dimana peneliti secara terstruktur melakukan tinjauan, evaluasi, dan interpretasi terhadap semua penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam topik yang sama (Sugiyono, 2020). Dalam metode ini, peneliti secara teliti memeriksa dan mengidentifikasi jurnal yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam setiap tahap penelitian. Untuk memilih jurnal-jurnal yang akan disertakan dalam penelitian ini, peneliti menetapkan kriteria bahwa harus ada minimal 5 jurnal yang diterbitkan antara tahun 2018 hingga 2023, dan jurnal-jurnal ini harus berasal dari sumber-sumber nasional maupun internasional yang terdaftar secara resmi di situs mereka. Data dikumpulkan dengan cara mendokumentasikan semua artikel dan jurnal yang berkaitan dengan topik komunikasi interpersonal dalam konteks implementasi pemberantasan korupsi di tingkat RT.

Rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi kebijakan pemberantasan korupsi di tingkat RT tercermin dalam praktik sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan dana dan aset publik? (2) Apa peran pemimpin RT dalam mempromosikan integritas dan mencegah korupsi di lingkungan mereka, dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap peran mereka? (3) Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat RT, dan faktor-faktor apa yang memengaruhi partisipasi mereka? Rumusan masalah tersebut akan membantu penelitian untuk mendalam ke dalam praktik dan dinamika yang terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat RT.

Dengan menganalisis peran pemimpin RT, faktor-faktor budaya dan sosial, serta partisipasi masyarakat, penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang implementasi pemberantasan korupsi di tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Tindak Pidana Korupsi di Beberapa Wilayah Indonesia

Korupsi adalah tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk tujuan pribadi atau kepentingan pihak ketiga, seringkali dengan cara-cara yang melanggar hukum atau norma etika. Ini meliputi aktivitas seperti suap, penyalahgunaan dana publik, nepotisme, dan berbagai bentuk perilaku tidak jujur dalam lingkup pemerintahan, bisnis, atau sektor lainnya. Korupsi merugikan masyarakat dengan merusak prinsip-prinsip keadilan, menghambat pembangunan ekonomi, dan menciptakan ketidaksetaraan. Upaya pencegahan dan penindakan korupsi menjadi fokus penting dalam upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan (Dzirusydi et al., 2022).

Secara praktis, ada beberapa kasus konkret yang terkait dengan dugaan korupsi dalam program bantuan sosial untuk mengatasi pandemic covid-19 lalu. Contohnya, terdapat kasus mark-up dana bantuan sosial Covid-19 di Provinsi Lampung, di mana Kepala Biro Kesejahteraan Sosial (Kessos) diduga menyalahgunakan dana bantuan sosial sembako untuk masyarakat yang terdampak pandemi dengan memanipulasi anggaran dan kontrak dengan pihak ketiga penyedia barang. Selain itu, ada juga kasus di Jawa Barat yang melibatkan aparaturnya kewilayahan seperti camat, kepala desa, perangkat desa, hingga ketua RT yang diduga memotong dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat penerima dan menggantikan isi dus bantuan sosial dengan produk yang kualitas dan harganya lebih rendah (Alfedo & Azmi, 2020).

Selain itu, terdapat kasus di Desa Banpares, Sumatera Selatan, di mana kepala dusun dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diduga memotong dana bantuan langsung tunai (BLT) yang seharusnya diterima oleh warga yang terdampak pandemi Covid-19. Kesemua kasus tersebut menyoroti kerentanannya dana bantuan sosial yang semestinya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (Alfedo & Azmi, 2020).

Implementasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Tingkat RT dalam Pengelolaan Dana dan Aset Publik

Implementasi kebijakan pemberantasan korupsi di tingkat RT sangat penting untuk memastikan pengelolaan dana dan aset publik yang lebih transparan dan akuntabel. Pertama-tama, diperlukan komitmen kuat dari para pemimpin RT dan warga masyarakat untuk bekerja sama dalam upaya pencegahan korupsi. Ini dapat dicapai melalui kesadaran akan konsekuensi hukum dan etika dari tindakan korupsi. Selain itu, pihak berwenang RT juga harus memastikan bahwa semua transaksi keuangan dan pengelolaan dana publik dilakukan secara terbuka, misalnya dengan mengadakan rapat rutin untuk membahas penggunaan dana dan aset publik (Dzirusydi et al., 2022).

Selanjutnya, proses penganggaran dan alokasi dana publik di tingkat RT harus didasarkan pada prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat. Pemberian kepercayaan kepada warga untuk mengawasi penggunaan dana dan aset publik akan membantu mencegah tindakan korupsi. Ini dapat diwujudkan melalui pembentukan komite pengawas keuangan di tingkat RT yang terdiri dari anggota masyarakat yang independen dan memiliki pengetahuan keuangan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan tentang etika dan pencegahan korupsi harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana dan aset publik di tingkat RT. Hal ini akan membantu meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi dan mengedukasi mereka tentang praktik-praktik yang sah. Dengan demikian, implementasi kebijakan pemberantasan korupsi akan lebih mudah tercermin dalam praktik sehari-hari di tingkat RT (Helminasari et al., 2023).

Selanjutnya, penting untuk memiliki mekanisme pelaporan yang efektif dan perlindungan bagi para pelapor korupsi di tingkat RT. Ini akan mendorong lebih banyak warga untuk melaporkan tindakan korupsi yang mereka saksikan tanpa takut akan balasan negatif. Melembagakan perlindungan pelapor akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan praktik anti-korupsi yang kuat di tingkat RT. Terakhir, pemerintah setempat perlu memberikan dukungan dan bimbingan teknis kepada RT dalam hal pengelolaan keuangan dan aset publik. Hal ini akan membantu RT untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan

transparansi dengan lebih baik dalam praktik sehari-hari. Dengan adanya dukungan ini, implementasi kebijakan pemberantasan korupsi dapat lebih efektif dan terlihat dalam tindakan nyata di tingkat RT (Achidsti et al., 2020).

Peran Pemimpin RT dalam Mempromosikan Integritas dan Mencegah Korupsi di Lingkungan Masyarakat

Pemimpin RT memiliki peran sentral dalam mempromosikan integritas dan mencegah korupsi di lingkungan mereka. Pertama, mereka berfungsi sebagai penggerak utama dalam membangun budaya integritas di komunitas. Pemimpin RT dapat menjadi teladan dengan menunjukkan perilaku yang jujur, transparan, dan etis. Mereka juga memiliki peran dalam mengkomunikasikan pentingnya integritas kepada warga dan memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum tindakan korupsi (Rusdiana & Hikmah, 2020).

Selanjutnya, pemimpin RT berperan penting dalam pengelolaan dana dan aset publik di tingkat RT. Mereka harus memastikan bahwa proses alokasi dan penggunaan dana publik berjalan dengan transparan dan akuntabel. Ini melibatkan pembuatan anggaran yang jelas, pemantauan yang ketat terhadap pengeluaran, serta pelaporan yang teratur kepada warga masyarakat. Dengan demikian, pemimpin RT dapat menghindari potensi tindakan korupsi dan menjaga integritas dalam pengelolaan aset publik.

Persepsi masyarakat terhadap peran pemimpin RT dalam mempromosikan integritas dan mencegah korupsi dapat bervariasi. Beberapa warga mungkin merasa puas jika pemimpin RT aktif memerangi korupsi dan menjalankan pemerintahan yang bersih. Namun, ada juga kemungkinan bahwa beberapa warga mungkin merasa skeptis terhadap pemimpin RT, terutama jika mereka telah terlibat dalam tindakan korupsi atau tidak menjalankan tugas mereka dengan baik. Masyarakat yang percaya pada pemimpin RT yang jujur dan bertanggung jawab akan lebih cenderung mendukung upaya pemimpin RT dalam mempromosikan integritas (Helminasari et al., 2023).

Penting untuk memahami persepsi masyarakat terhadap peran pemimpin RT, baik melalui survei atau dialog terbuka. Dengan demikian, pemimpin RT dapat memperbaiki kinerja mereka dan membangun kepercayaan warga terhadap upaya pencegahan korupsi. Selain itu, pemimpin RT perlu berkomunikasi secara terbuka dengan warga untuk menjelaskan tindakan yang telah diambil dalam rangka mencegah korupsi dan mempromosikan integritas di lingkungan mereka. Dengan transparansi dan komunikasi yang baik, pemimpin RT dapat membangun dukungan lebih kuat dari masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi (Sufaidi et al., 2023).

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Tingkat RT dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Mereka

Partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat RT adalah faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Namun, tingkat partisipasi ini sering kali bervariasi, dan ada beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat. Pertama, tingkat kesadaran masyarakat tentang korupsi dan dampak negatifnya sangat memengaruhi partisipasi. Masyarakat yang lebih sadar tentang pentingnya pemberantasan korupsi akan lebih cenderung terlibat dalam upaya tersebut. Oleh karena itu, penyuluhan dan edukasi tentang korupsi perlu dilakukan secara teratur di tingkat RT untuk meningkatkan kesadaran warga (Achidsti et al., 2020).

Faktor kedua adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah RT dan lembaga-lembaga terkait. Jika masyarakat percaya bahwa pemerintah RT dan lembaga pengawasan dapat menangani laporan dan aduan mereka dengan baik, mereka akan lebih termotivasi untuk melaporkan tindakan korupsi. Kepercayaan ini dapat dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan responsifitas dari pemerintah RT. Faktor ketiga adalah keamanan bagi para pelapor. Masyarakat cenderung lebih berpartisipasi jika mereka merasa aman untuk melaporkan tindakan korupsi tanpa takut akan balasan atau ancaman. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi para pelapor korupsi harus diberikan dengan jelas dan ditegakkan (Fericco et al., 2020).

Selain itu, faktor keempat adalah kualitas komunikasi antara pemerintah RT dan masyarakat. Pemerintah RT harus memastikan bahwa informasi tentang upaya pemberantasan korupsi dan cara melaporkan tindakan korupsi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Komunikasi yang efektif akan mendorong partisipasi aktif. Faktor kelima adalah motivasi internal warga untuk berkontribusi pada upaya pemberantasan korupsi. Ini dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai etika dan keadilan yang dianut oleh masyarakat, serta keyakinan mereka terhadap perbaikan

kualitas hidup dan pemerintahan yang lebih baik. Meningkatkan motivasi internal ini melalui pendidikan dan kesadaran akan dampak positif pemberantasan korupsi dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkat RT (Rusdiana & Hikmah, 2020).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemberantasan korupsi di tingkat RT sangat penting untuk memastikan pengelolaan dana dan aset publik yang lebih transparan dan akuntabel. Diperlukan komitmen kuat dari para pemimpin RT dan warga masyarakat untuk bekerja sama dalam upaya pencegahan korupsi. Pemimpin RT memiliki peran sentral dalam mempromosikan integritas dan mencegah korupsi di lingkungan mereka. Pemimpin RT dapat menjadi teladan dengan menunjukkan perilaku yang jujur, transparan, dan etis. Pemimpin RT berperan penting dalam pengelolaan dana dan aset publik di tingkat RT. Mereka harus memastikan bahwa proses alokasi dan penggunaan dana publik berjalan dengan transparan dan akuntabel. Partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat RT adalah faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Namun, tingkat partisipasi ini sering kali bervariasi, dan ada beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat diantaranya tingkat kesadaran masyarakat tentang korupsi dan dampak negatifnya serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah RT dan lembaga-lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Achidsti, A., Kafa, M. Z., & Hudani, A. M. (2020). Tata Kelola Pendataan dan Penyaluran BLT-DD Melalui Pasar desa.id sebagai Upaya Pencegahan Korupsi. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 313–326. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.681>
- Alfedo, J. M., & Azmi, R. H. N. (2020). Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 283–296.
- Dzirusyidi, Z., Mitrayati, Thasimmim, S. N., Jaya, N. A., Risnawati, A., & Putri, D. A. (2022). Meningkatkan Pemahaman Dan Menanamkan Budaya Anti Korupsi Kepada Masyarakat Rt 02 Rw 03 Kel. Sei Lakam Dalam Konsep Islam. *Jurnal Awam: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Kepada Masyarakat*, 2(2), 36–43.
- Ferico, S., Aryanti, E. P., & Salsabila, M. H. (2020). Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 1(1), 1–15.
- Helminasari, S., As Salami, M. F., Gideon, O., & Mustaf, S. (2023). Penerapan Nilai-Nilai Korupsi Pada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Pendidikan Anti Korupsi Di Kelurahan Karang Anyar Kota Samarinda. *Jurnal Pengabdian Kreativitas Pendidikan Mahakam (JPKPM)*, 3(1), 85–90.
- Rusdiana, E., & Hikmah, N. (2020). Implementasi Gerakan Anti Korupsi sebagai Upaya Pencegahan Korupsi pada Lembaga Anti Korupsi di Propinsi Jawa Timur. *Perspektif Hukum*, 20(1), 18–40.
- Sufaidi, A., Gerald, G., & Putri, R. Y. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Anti Korupsi di Desa Watesari Sidoarjo. *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 14(1), 174–180.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.